

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : SP DIPA- 135.11.2.693097/2026

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
- 2. Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
- 3. Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
- 4. Kode>Nama Satker : (693097) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN
- Sebesar : Rp. 3.899.489.000 ( TIGA MILIAR DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA EMPAT RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
- 03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

|                               |     |               |                                |     |   |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni               | Rp. | 3.899.489.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB                        | Rp. |               | - Pinjaman Dalam Negeri        | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan             | Rp. | 0             | - Hibah Dalam Negeri           | Rp. | 0 |
|                               |     |               | 5. Hibah Langsung              | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0             | - Hibah Luar Negeri Langsung   | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri        | Rp. | 0             | - Hibah Dalam Negeri Langsung  | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri           | Rp. | 0             | 6. SBSN PBS                    | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN MAKASSAR II (136) Rp. 3.899.489.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

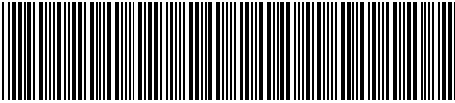
ttd.  
LUKY ALFIRMAN  
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : DIPA- 135.11.2.693097/2026

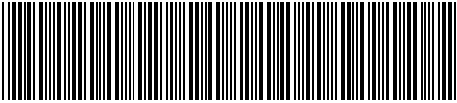


DS:5256-4806-0635-0963

Satker : (693097) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN

|         |                                                                                       |     |               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| BB      | Program Pembentukan Regulasi                                                          | Rp. | 40.319.000    |
| BB.7133 | Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah | Rp. | 40.319.000    |
| BF      | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum                                                 | Rp. | 3.859.170.000 |
| BF.7136 | Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah                                            | Rp. | 3.859.170.000 |

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**  
**NOMOR : DIPA- 135.11.2.693097/2026**  
**I A. INFORMASI KINERJA**



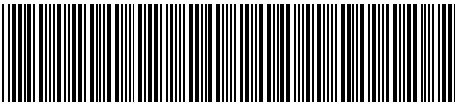
DS:5256-4806-0635-0963

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM  
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN  
Kode>Nama Satker : (693097) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN

Halaman : I A. 1

|                            |   |           |                                                                                                                             |                                                                        |        |                       |
|----------------------------|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| Program                    | : | 135.11.BB | Program Pembentukan Regulasi                                                                                                |                                                                        |        | 40.319.000            |
| Kegiatan                   | : | 7133      | Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah                                       |                                                                        |        | 40.319.000            |
| Indikator Kinerja Kegiatan | : | 1. 01     | Persentase hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemda di wilayah kerja Kanwil |                                                                        |        |                       |
| Klasifikasi Rincian Output | 1 | :         | 7133.ABD                                                                                                                    | Kebijakan Bidang Hukum dan HAM                                         | 1,00   | Rekomendasi Kebijakan |
| Rincian Output             | : | 01        | ABD.001                                                                                                                     | Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Hukum di Daerah                      | 1.00   | Rekomendasi Kebijakan |
| Program                    | : | 135.11.BF | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum                                                                                       |                                                                        |        | 3.859.170.000         |
| Kegiatan                   | : | 7136      | Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah                                                                                  |                                                                        |        | 3.859.170.000         |
| Indikator Kinerja Kegiatan | : | 1. 01     | Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi                                                         |                                                                        |        |                       |
|                            |   | 2. 01     | Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan                                       |                                                                        |        |                       |
|                            |   | 3. 01     | Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah                                    |                                                                        |        |                       |
| Klasifikasi Rincian Output | 1 | :         | 7136.BDB                                                                                                                    | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga                                       | 8,00   | Lembaga               |
| Rincian Output             | : | 01        | BDB.001                                                                                                                     | Pengelolaan anggota JDIHN di wilayah                                   | 8.00   | Lembaga               |
| Klasifikasi Rincian Output | 2 | :         | 7136.BDC                                                                                                                    | Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat                                    | 300,00 | Orang                 |
| Rincian Output             | : | 01        | BDC.001                                                                                                                     | Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat melalui Penyuluhan Hukum di Daerah | 300.00 | Orang                 |
| Klasifikasi Rincian Output | 3 | :         | 7136.BIC                                                                                                                    | Pengawasan dan Pengendalian Lembaga                                    | 41,00  | Lembaga               |
| Rincian Output             | : | 01        | BIC.001                                                                                                                     | Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Daerah                         | 41.00  | Lembaga               |

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693097/2026  
I A. INFORMASI KINERJA



DS:5256-4806-0635-0963

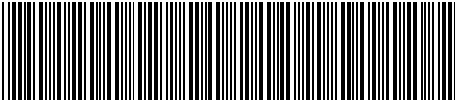
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM  
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN  
Kode>Nama Satker : (693097) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN

|                            |   |   |          |                                           |                                                                        |        |                     |               |
|----------------------------|---|---|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------------|
| Klasifikasi Rincian Output | 4 | : | 7136.BMA | Data dan Informasi Publik                 |                                                                        | 1,00   | dokumen, Peta, Data | 22.790.000    |
| Rincian Output             |   | : | 01       | BMA.001                                   | Inventarisasi Permasalahan Hukum di Wilayah                            | 1,00   | Data                | 22.790.000    |
| Klasifikasi Rincian Output | 5 | : | 7136.QBA | Layanan Bantuan Hukum Perseorangan        |                                                                        | 375,00 | Orang               | 3.000.000.000 |
| Rincian Output             |   | : | 01       | QBA.U01                                   | Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi (PN)                                   | 375,00 | Orang               | 3.000.000.000 |
| Klasifikasi Rincian Output | 6 | : | 7136.QBC | Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat |                                                                        | 51,00  | Kelompok Masyarakat | 544.170.000   |
| Rincian Output             |   | : | 01       | QBC.U01                                   | Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi (PN)                               | 51,00  | Kelompok Masyarakat | 544.170.000   |
| Klasifikasi Rincian Output | 7 | : | 7136.QDB | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga          |                                                                        | 1,00   | Lembaga             | 140.000.000   |
| Rincian Output             |   | : | 01       | QDB.001                                   | Layanan Pendampingan Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan (PN) | 1,00   | Lembaga             | 140.000.000   |

Jakarta, 01 Desember 2025  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.  
MIN USIHEN  
NIP. 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693097/2026  
I B. SUMBER DANA



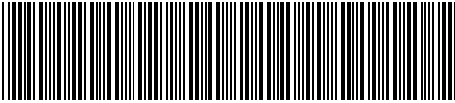
DS:5256-4806-0635-0963

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM  
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN  
Kode>Nama Satker : (693097) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN

|                                |     |               | Pagu  |                                          | Ekuivalen Rupiah |       |
|--------------------------------|-----|---------------|-------|------------------------------------------|------------------|-------|
| 1. Anggaran Tahun 2026         | Rp. | 3.899.489.000 | Ket : | a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing | US\$             | 0 Rp. |
| 1. Rupiah Murni                | Rp. | 3.899.489.000 |       | (2) RPLN                                 | US\$             | 0 Rp. |
| 2. PNPB                        | Rp. |               |       | b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing    | US\$             | 0 Rp. |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri  | Rp. | 0             |       | (2) RHLN                                 | US\$             | 0 Rp. |
| 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0             |       | c. Pinjaman Dalam Negeri                 | IDR              | 0     |
| 5. Hibah Langsung              | Rp. | 0             |       | d. Hibah Dalam Negeri                    | IDR              | 0     |
| 6. SBSN PBS                    | Rp. | 0             |       | e. Hibah Luar Negeri Langsung            | IDR              | 0     |
| 2. Rincian Pinjaman / Hibah :  |     |               |       | f. Hibah Dalam Negeri Langsung           | IDR              | 0     |
| (dalam ribuan rupiah)          |     |               |       |                                          |                  |       |

| No. | SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH<br>No. NPP/H per Tahun<br>No. Register |        | PAGU TAHUN INI |      | RINCIAN DANA BERDASARKAN<br>CARA PENARIKAN |      | DANA PENDAMPING |       |             |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------|--------------------------------------------|------|-----------------|-------|-------------|
|     | Kode                                                             | Uraian | Kode           | Dana | Kode                                       | Dana | Rp. Pdp         | Rp.LN | Rp.Loc.Cost |
| 1   | 2                                                                | 3      | 4              | 5    | 6                                          | 7    | 8               | 9     | 10          |
|     |                                                                  |        |                |      |                                            |      |                 |       |             |

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693097/2026  
II. RINCIAN PENGELUARAN



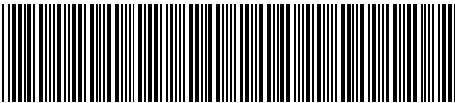
DS:5256-4806-0635-0963

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM  
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN  
Kode>Nama Satker : (693097) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

| KODE      | URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA                                        | BELANJA         |                |               |                           |                   |                        | LOKASI/<br>KPPN | CARA<br>PENARIKAN/<br>REGISTER |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|
|           |                                                                                       | PEGAWAI<br>[51] | BARANG<br>[52] | MODAL<br>[53] | BANTUAN<br>SOSIAL<br>[57] | LAIN-LAIN<br>[58] | JUMLAH<br>SELURUH<br>8 |                 |                                |
| 1         | 2                                                                                     | 3               | 4              | 5             | 6                         | 7                 | 8                      | 9               | 10                             |
| 693097    | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN                                     | -               | 3.899.489      | -             | -                         | -                 | 3.899.489              | 19 . 51         |                                |
| 135.11.BB | Program Pembentukan Regulasi                                                          | -               | 40.319         | -             | -                         | -                 | 40.319                 |                 |                                |
| 7133      | Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah | -               | 40.319         | -             | -                         | -                 | 40.319                 |                 |                                |
| 7133.ABD  | Kebijakan Bidang Hukum dan HAM<br>(19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)            | -               | 40.319         | -             | -                         | -                 | 40.319                 |                 |                                |
| 01        | RM                                                                                    | -               | 40.319         | -             | -                         | -                 | 40.319                 |                 |                                |
| 135.11.BF | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum                                                 | -               | 3.859.170      | -             | -                         | -                 | 3.859.170              |                 |                                |
| 7136      | Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah                                            | -               | 3.859.170      | -             | -                         | -                 | 3.859.170              |                 |                                |
| 7136.BDB  | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga<br>(19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)          | -               | 39.461         | -             | -                         | -                 | 39.461                 |                 |                                |
| 01        | RM                                                                                    | -               | 39.461         | -             | -                         | -                 | 39.461                 |                 |                                |
| 7136.BDC  | Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat<br>(19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)       | -               | 49.900         | -             | -                         | -                 | 49.900                 |                 |                                |

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693097/2026  
II. RINCIAN PENGELUARAN

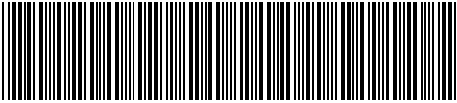


DS:5256-4806-0635-0963

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM  
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN  
Kode>Nama Satker : (693097) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN  
Kewenangan : (KD)

| KODE     | URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA                                        | BELANJA         |                |               |                           |                   |                        | LOKASI/<br>KPPN | CARA<br>PENARIKAN/<br>REGISTER |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|
|          |                                                                                       | PEGAWAI<br>[51] | BARANG<br>[52] | MODAL<br>[53] | BANTUAN<br>SOSIAL<br>[57] | LAIN-LAIN<br>[58] | JUMLAH<br>SELURUH<br>8 |                 |                                |
| 1        | 2                                                                                     | 3               | 4              | 5             | 6                         | 7                 | 8                      | 9               | 10                             |
| 01 RM    |                                                                                       | -               | 49.900         | -             | -                         | -                 | 49.900                 | 136             |                                |
| 7136.BIC | Pengawasan dan Pengendalian Lembaga<br>(19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)       | -               | 62.849         | -             | -                         | -                 | 62.849                 | 19 . 51         |                                |
| 01 RM    |                                                                                       | -               | 62.849         | -             | -                         | -                 | 62.849                 | 136             |                                |
| 7136.BMA | Data dan Informasi Publik<br>(19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)                 | -               | 22.790         | -             | -                         | -                 | 22.790                 | 19 . 51         |                                |
| 01 RM    |                                                                                       | -               | 22.790         | -             | -                         | -                 | 22.790                 | 136             |                                |
| 7136.QBA | Layanan Bantuan Hukum Perseorangan<br>(19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)        | -               | 3.000.000      | -             | -                         | -                 | 3.000.000              | 19 . 51         |                                |
| 01 RM    |                                                                                       | -               | 3.000.000      | -             | -                         | -                 | 3.000.000              | 136             |                                |
| 7136.QBC | Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat<br>(19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR) | -               | 544.170        | -             | -                         | -                 | 544.170                | 19 . 51         |                                |
| 01 RM    |                                                                                       | -               | 544.170        | -             | -                         | -                 | 544.170                | 136             |                                |

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693097/2026  
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:5256-4806-0635-0963

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM  
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN  
Kode>Nama Satker : (693097) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 3  
(dalam ribuan rupiah)

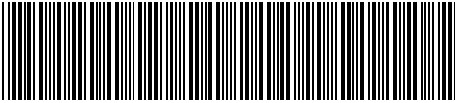
| KODE     | URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA                               | BELANJA         |                |               |                           |                   |                        | LOKASI/<br>KPPN | CARA<br>PENARIKAN/<br>REGISTER |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|
|          |                                                                              | PEGAWAI<br>[51] | BARANG<br>[52] | MODAL<br>[53] | BANTUAN<br>SOSIAL<br>[57] | LAIN-LAIN<br>[58] | JUMLAH<br>SELURUH<br>8 |                 |                                |
| 1        | 2                                                                            | 3               | 4              | 5             | 6                         | 7                 | 8                      | 9               | 10                             |
| 7136.QDB | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga<br>(19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR) | -               | 140.000        | -             | -                         | -                 | 140.000                | 19 . 51         |                                |
|          | 01 RM                                                                        | -               | 140.000        | -             | -                         | -                 | 140.000                | 136             |                                |
| JUMLAH   |                                                                              | -               | 3.899.489      | -             | -                         | -                 | 3.899.489              |                 |                                |

Jakarta, 01 Desember 2025  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.  
MIN USIHEN  
NIP. 197105011993031001



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693097/2026  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:5256-4806-0635-0963

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM  
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN  
Kode>Nama Satker : (693097) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN

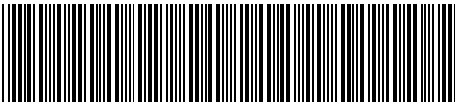
Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

| NO                                            | KODE           | URAIAN SATKER                                                                               | RENCANA PENARIKAN |          |         |         |         |         |         |         |           |         |          |           | JUMLAH<br>SELURUH |
|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|----------|-----------|-------------------|
|                                               |                |                                                                                             | JANUARI           | FEBRUARI | MARET   | APRIL   | MEI     | JUNI    | JULI    | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER  |                   |
| 1                                             | 2              | 3                                                                                           | 4                 | 5        | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12        | 13      | 14       | 15        | 16                |
| 1.                                            | 693097         | KANTOR WILAYAH<br>KEMENTERIAN HUKUM<br>SULAWESI SELATAN                                     |                   |          |         |         |         |         |         |         |           |         |          |           |                   |
|                                               |                | RENCANA PENARIKAN DANA                                                                      | 3.285             | 8.785    | 572.785 | 325.632 | 625.285 | 345.285 | 56.075  | 602.851 | 389.257   | 358.285 | 313.285  | 298.679   | 3.899.489         |
|                                               | 135.11.BB.7133 | BELANJA BARANG                                                                              | 3.285             | 8.785    | 572.785 | 325.632 | 625.285 | 345.285 | 56.075  | 602.851 | 389.257   | 358.285 | 313.285  | 298.679   | 3.899.489         |
|                                               |                | Penyelenggaraan Pembangunan<br>Hukum Nasional dan Analisis dan<br>Evaluasi Hukum di Wilayah | 0                 | 0        | 0       | 2.000   | 7.000   | 7.000   | 10.000  | 14.319  | 0         | 0       | 0        | 0         | 40.319            |
|                                               | 135.11.BF.7136 | 52 BELANJA BARANG DAN JASA                                                                  | 0                 | 0        | 0       | 2.000   | 7.000   | 7.000   | 10.000  | 14.319  | 0         | 0       | 0        | 0         | 40.319            |
| Penyelenggaraan Pembinaan<br>Hukum di Wilayah |                | 3.285                                                                                       | 8.785             | 572.785  | 323.632 | 618.285 | 338.285 | 46.075  | 588.532 | 389.257 | 358.285   | 313.285 | 298.679  | 3.859.170 |                   |
|                                               |                | 52 BELANJA BARANG DAN JASA                                                                  | 3.285             | 8.785    | 572.785 | 323.632 | 618.285 | 338.285 | 46.075  | 588.532 | 389.257   | 358.285 | 313.285  | 298.679   | 3.859.170         |

Jakarta, 01 Desember 2025  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.  
MIN USIHEN  
NIP. 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693097/2026  
IV A. B L O K I R



DS:5256-4806-0635-0963

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM  
Unit Organisasi : [11] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Provinsi : [19] SULAWESI SELATAN  
Kode dan Nama Satker : [693097] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN

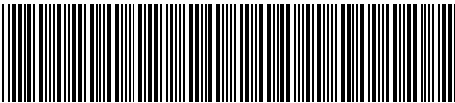
Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

| KODE | URAIAN | KODE | URAIAN |
|------|--------|------|--------|
|      |        |      |        |

Jakarta, 01 Desember 2025  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.  
MIN USIHEN  
NIP. 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693097/2026  
IV B. C A T A T A N



DS:5256-4806-0635-0963

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM  
Unit Organisasi : [11] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Provinsi : [19] SULAWESI SELATAN  
Kode dan Nama Satker : [693097] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

| KODE | URAIAN | KODE | URAIAN |
|------|--------|------|--------|
|      |        |      |        |

Jakarta, 01 Desember 2025  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.  
MIN USIHEN  
NIP. 197105011993031001